

GEOPOLITIK KEAMANAN MARITIM DI LAUT CINA SELATAN: ANALISIS PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM STRATEGIS TAHUN 2022 - 2024

Danang Wahyu Utomo¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The South China Sea (SCS) is one of the most strategic international shipping routes and is rich in natural resources, making it a source of geopolitical tensions in the Southeast Asian region. As the world's largest maritime nation, Indonesia plays a crucial role in maintaining stability and sovereignty over its maritime territory, particularly in the North Natuna Sea, which directly borders the South China Sea. This study aims to analyze Indonesia's role as a strategic maritime nation in addressing the South China Sea dispute, as well as the policies and diplomacy implemented by Indonesia to safeguard maritime security in the region.

The research method used is a descriptive qualitative approach with data analysis from primary and secondary sources, including official documents, scientific journals, and international policy reports. The key findings of this study indicate that although Indonesia is not directly involved in the territorial disputes of the South China Sea, it has significant interests in maintaining freedom of navigation and the sovereignty of its maritime territory. Indonesia not only strengthens its maritime sector but also actively participates in ASEAN forums and international diplomacy to promote peaceful dispute resolution based on international law. Additionally, Indonesia continues to enhance its maritime defense capabilities and strengthen cooperation with major countries to maintain regional stability.

Keywords: Geopolitics, Maritime Security, South China Sea, Indonesia, ASEAN

ABSTRAK

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang paling strategis dan kaya akan sumber daya alam, yang menjadikannya sumber ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah maritimnya, terutama di kawasan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia sebagai negara maritim strategis dalam menghadapi sengketa Laut Cina Selatan serta kebijakan dan diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di kawasan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan-laporan kebijakan internasional. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial Laut Cina Selatan, memiliki kepentingan besar dalam menjaga kebebasan navigasi dan kedaulatan wilayah maritimnya. Indonesia tidak hanya memperkuat maritimnya namun secara aktif berperan dalam forum ASEAN dan diplomasi internasional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat kemampuan pertahanan maritim dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara besar dalam rangka mempertahankan stabilitas regional.

Kata Kunci: Geopolitik, Keamanan Maritim, Laut Cina Selatan, Indonesia, ASEAN

PENDAHULUAN

Laut China Selatan adalah jalur perairan penting yang menghubungkan berbagai negara di kawasan Asia dan menjadi salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia serta diyakini menyimpan sumber daya alam bawah laut yang melimpah. Gas dan minyak yang terkandung di bawah Laut China Selatan sangat bernilai, dan hal tersebut memicu persaingan antara negara-negara yang memiliki klaim teritorial di wilayah tersebut termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Beberapa wilayah yang memiliki potensi besar gas dan minyak di Laut China Selatan antara lain: Pertama, Kepulauan Spratly, kawasan ini memiliki potensi besar sumber daya alam, termasuk gas alam dan minyak. Kedua, Laut Natuna, terletak di perbatasan antara Indonesia dan Laut China Selatan, wilayah ini juga diyakini memiliki cadangan gas yang signifikan. Konflik tumpang tindih klaim dengan China sering kali terjadi di area ini. Ketiga, Kepulauan Paracel, wilayah ini juga memiliki potensi energi yang besar dan menjadi titik sengketa antara China dan Vietnam.

Dengan potensi besar cadangan energi yang terkandung di Laut China Selatan, negara-negara yang memiliki klaim teritorial berusaha untuk mengamankan akses mereka terhadap sumber daya ini. Hal ini memperburuk ketegangan karena negara-negara tersebut tidak hanya memperjuangkan kedaulatan wilayah, tetapi juga hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut hingga tidak jarang memicu konflik di wilayah Laut China Selatan. Selain itu, konflik mengenai klaim teritorial dan akses ke sumber daya alam sering kali melibatkan masalah kebebasan navigasi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang melakukan operasi kebebasan pelayaran untuk menanggapi klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.

Dalam hal ini, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial di Laut China Selatan, tetapi mereka terlibat dalam sengketa terkait dengan klaim China atas wilayah Laut Natuna, yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Laut Natuna terletak di utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Indonesia menganggap bahwa China memiliki klaim sepihak yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, terutama di sekitar Kepulauan Natuna. Indonesia menegaskan haknya untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk gas alam yang melimpah.

Indonesia memiliki peran strategis yang sangat penting dalam konteks Laut China Selatan, meskipun negara ini tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial Laut China Selatan seperti beberapa negara lain. Meskipun demikian, Indonesia memiliki kepentingan besar terkait dengan keamanan maritim, kebebasan navigasi, serta pengelolaan sumber daya alam di sekitar wilayah yang berbatasan dengan Laut China Selatan, khususnya di area Kepulauan Natuna. Indonesia perlu memastikan bahwa eksplorasi sumber daya alam di sekitar Natuna berjalan dengan aman dan tidak terganggu oleh klaim sepihak dari negara lain. Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mengamankan hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut yang masih disengketakan, terutama yang berkaitan dengan gas dan minyak yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi nasional.

Indonesia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas di Laut China Selatan melalui diplomasi multilateral dan kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas, Indonesia berperan penting dalam

menjaga kebebasan navigasi, melindungi sumber daya alam, serta mendukung penyelesaian damai melalui diplomasi multilateral. Indonesia juga memperkuat kemampuan pertahanan dan pengawasan wilayah lautnya, terutama di sekitar Kepulauan Natuna, untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini peran serta Indonesia di Laut China Selatan sangat dibutuhkan, baik dalam kepentingan nasional Indonesia sendiri maupun komitmen Indonesia dalam menjaga kestabilan kawasannya.

Indonesia sebagai negara maritim juga mempunyai potensi terhadap ancaman, baik itu yang bersifat ancaman tradisional maupun yang bersifat non-tradisional. Ancaman yang bersifat tradisional meliputi ancaman militer dari negara lain seperti invansi, agresi militer, gangguan keamanan teritorial, sedangkan ancaman non-tradisional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal drugs*, *illegal mining*, dan *human trafficking* atau ancaman perompak, perampok bersenjata atau lainnya. Globalisasi membuat ancaman di laut berkembang seperti mengganggu *good order at sea* yang meliputi serangan teroris, ancaman terhadap perampokan cargo, adanya *illegal migrant* dan perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trade*) (Subagyo dan Wirasuta, 2013).

Konflik Laut China Selatan ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi hukum yang berkaitan dengan kedaulatan; dan dimensi politik yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia menegaskan bahwa posisi negaranya adalah sebagai *non-claimant states* (negara yang tidak menuntut klaim atas Laut China Selatan) sehingga Indonesia tetap memiliki hubungan yang baik dengan beberapa negara yang terlibat atas klaim Laut China Selatan.

Berdasarkan uraian masalah sengketa di Laut China Selatan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang memerlukan pemikiran strategis yang merujuk pada “**Peran Indonesia sebagai negara maritim strategis di Laut China Selatan pada tahun 2022-2024**”.

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini berfokus untuk memahami peran Indonesia sebagai negara maritim di Laut China Selatan sehingga penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif konstruktivisme dengan mengadopsi pemikiran Alexander Wendt. Perspektif konstruktivisme memusatkan perhatian pada peran norma dan identitas dalam menganalisis persoalan perang dan damai.

Salah satu pandangan konstruktivisme dalam hubungan internasional adalah komunitas keamanan, yakni perkumpulan antar-negara yang menyelesaikan permasalahan tanpa kekuatan militer, melainkan melalui cara-cara damai (*peaceful changes*). Dengan begitu, pandangan konstruktivisme memunculkan kerja sama antar negara secara konstruktif. Konstruktivisme memberikan perspektif bahwa hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan material, tetapi juga oleh norma, identitas, dan interaksi sosial.

Konstruktivisme melihat geopolitik keamanan maritim tidak hanya dari aspek kekuatan dan kepentingan material, tetapi juga norma, identitas, dan konstruksi sosial. Perspektif ini menyoroti bagaimana Indonesia membentuk identitas maritimnya dan berkontribusi pada stabilitas kawasan melalui diplomasi dan norma internasional.

Sedangkan, geopolitik adalah studi mengenai hubungan antara ruang geografis, kekuatan politik, dan dinamika internasional. Geopolitik mencoba untuk memahami bagaimana faktor-faktor geografis, seperti lokasi, sumber daya alam, iklim, dan topografi, memengaruhi kebijakan politik, kekuatan negara-negara, dan konflik internasional. Beberapa elemen utama dalam studi geopolitik melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik bersaing untuk mengamankan kepentingan nasional mereka di tingkat regional atau global. Faktor-faktor seperti kontrol teritorial, akses ke sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, dan hubungan antar negara menjadi fokus penting dalam analisis geopolitik.

Dalam hubungan internasional, geopolitik menjadi faktor kunci dalam menentukan kebijakan luar negeri, konflik, serta keseimbangan kekuatan global. Geopolitik juga dapat membantu kita mengidentifikasi akar penyebab konflik dan merancang strategi untuk mencegah atau menyelesaikan konflik. Geopolitik menjadi dasar strategi pertahanan dan keamanan suatu negara. Pemerintah dapat memanfaatkan analisis geopolitik untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif sekaligus untuk memperkuat identitas nasional dan mempertahankan kedaulatan.

Penelitian ini juga menggunakan konsep lainnya seperti pertahanan dan keamanan maritim serta hukum internasional. Hukum internasional menjadi dasar dalam menjaga ketertiban global dengan mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur, menyelesaikan sengketa, dan menjaga stabilitas di Laut China Selatan, terutama dalam menghadapi klaim tumpang tindih serta ancaman terhadap keamanan maritim. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara maritim strategis menggunakan hukum internasional untuk menegakkan kedaulatan dan kepentingannya, khususnya di sekitar Laut Natuna Utara yang sering mengalami pelanggaran oleh kapal asing.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, serta aktivitas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan guna memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada (Danim, 2002). Tipe penelitian deskriptif analitis pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia dalam geopolitik keamanan maritim di Laut China Selatan berdasarkan kebijakan pertahanan dan diplomasi maritimnya serta mengidentifikasi tantangan dan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan maritim Indonesia di kawasan Laut China Selatan, baik dari perspektif tradisional (militer) maupun non-tradisional (kejahatan maritim, IUU *Fishing*, dan perompakan).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Selanjutnya data dianalisa dengan beberapa langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang kemudian diuji menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh akurasi data. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Indonesia sebagai negara maritim di Laut China Selatan.

PEMBAHASAN

Laut China Selatan adalah jalur air yang sangat penting secara geopolitik. Laut ini merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia. Menurut tonase kapal kargo tahunan dunia, lebih dari 50% kapal kargo melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Lebih dari 1,6 juta m³ (10 juta barel) minyak mentah per hari melewati Selat Malaka. Kawasan ini memiliki cadangan minyak bumi terbukti sebesar 1,2 km³ (7,7 miliar barel) dengan perkiraan total 4,5 km³ (28 miliar barel). Cadangan gas alamnya diperkirakan sebesar 7.500 km³ (266 triliun kaki kubik). Laporan *U.S. Energy Information Administration* tahun 2013 menaikkan perkiraan total cadangan minyak di sana menjadi 11 miliar barel. Pada tahun 2014, China memulai pencarian minyak di perairan yang dipersengketakan dengan Vietnam (Sorongan, 2022).

Posisi strategis LCS menjadi acuan negara China dalam mendirikan kedaulatan dan menentukan geostrategis negaranya. Bagi China, LCS merupakan jalur strategis untuk membangun kepentingan nasionalnya guna memperluas wilayah kedaulatan China agar negara yang berideologi komunis ini dapat menguasai wilayah yang sangat strategis untuk berada di wilayah kedaulatannya. Tetapi hal ini juga memicu konflik bagi negara-negara lain yang tidak ingin China mengklaim wilayah tersebut dan membuat konflik sengketa Laut China Selatan ini terjadi.

Ketegangan yang berkembang di Laut China Selatan, dengan klaim wilayah yang tumpang tindih dan sumber daya alam yang melimpah, telah menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus mengadopsi pendekatan diplomatik yang fleksibel dan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dan mendukung stabilitas kawasan.

A. Peran Indonesia sebagai Negara Maritim

Pertemuan yang diadakan antara pemerintah Indonesia dan China, menegaskan bahwa Indonesia bukan ingin mengakui klaim sepihak China atas Laut China Selatan melainkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai melalui dialog dan kerjasama internasional. Pernyataan itu adalah cerminan upaya Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan China tanpa mengorbankan hak-hak berdaulat atas wilayah Laut Natuna Utara.

Pendekatan itu menunjukkan fleksibilitas diplomatik yang menjadi ciri khas Indonesia, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Rencana dialog yang akan dijalin antara BAKAMLA dan *Coast Guard China*, serta pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), menegaskan bahwa Indonesia berupaya mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik.

Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan pada saat itu yakni Prabowo Subianto, menunjukkan sebuah kecerdasan dalam mengelola hubungan internasional yang kompleks. Dalam hal ini, Prabowo berupaya mengelola hubungan Indonesia dengan China secara bijaksana. Tidak hanya memperhatikan aspek pertahanan, Prabowo juga menekankan pentingnya dialog untuk mengurangi potensi konflik. Kepiawaian diplomatik ini sangat terlihat dalam kebijakan Indonesia yang mengutamakan kerjasama internasional sambil tetap menegaskan kedaulatan negara di Laut China Selatan.

Pendekatan diplomatik yang dilakukan oleh Prabowo juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika global, yang mengharuskan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan semua negara besar sambil tetap setia pada prinsip-prinsip kedaulatan dan perdamaian. Dengan langkah-langkah yang terukur ini, Indonesia memperlihatkan komitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa terjerumus dalam konfrontasi yang merugikan.

Untuk memahami peran Indonesia melalui diplomasi ini dapat dilihat menggunakan teori konstruktivisme yang menyoroti peran identitas dan nilai-nilai sosial dalam hubungan internasional. Konstruktivisme melihat bahwa negara tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan materi semata, tetapi juga berdasarkan norma, nilai, dan persepsi yang dibangun melalui interaksi antar negara. Terlihat dari kebijakan luar negeri Indonesia yang mencerminkan identitas negara yang berkomitmen pada penyelesaian damai dan kerja sama multilateral. Melalui dialog dengan China, Indonesia membentuk narasi yang mendukung penyelesaian perselisihan secara damai, sambil tetap memperjuangkan hak-haknya di Laut China Selatan.

Sebagai negara yang mendasarkan kebijakannya pada prinsip non-intervensi, Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Dialog ini bukan hanya untuk mencegah eskalasi konflik, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Langkah selanjutnya, Indonesia mendukung pembentukan *Code of Conduct (CoC)* di Laut China Selatan sebagai contoh konkret dari upaya diplomatik membangun saluran komunikasi antar negara di kawasan ini. CoC bertujuan mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam sengketa, menciptakan landasan hukum penyelesaian perselisihan, serta menghindari tindak kekerasan. Indonesia terus mendorong agar CoC dapat segera diadopsi dan diimplementasikan secara efektif, dan memberikan perlindungan terhadap kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah ZEE Laut Natuna Utara.

Dengan langkah-langkah diplomatik yang berkesinambungan dan peningkatan kemampuan pertahanan maritim, Indonesia memperlihatkan bahwa diplomasi bukan hanya tentang menjaga hubungan baik, tetapi juga tentang menjaga hak-hak maritim negara. Pendekatan yang hati-hati dan bijaksana ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingannya, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik (Saragih, 2018).

Bagi Indonesia, untuk mempersempit peluasan konflik yang berpotensi melibatkan Indonesia ke dalam konflik di Laut China Selatan, maka penegasan batas wilayah maritim ZEE Indonesia dengan negara tetangga yang bertumpang tindih, salah satunya dengan Vietnam di Perairan Natuna menjadi sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum penegasan batas wilayah yang tumpang tindih dalam menghadapi pelibatan pihak ketiga, terutama China.

Selanjutnya, Indonesia memulai suatu proses yang dituangkan dalam program kerja jangka panjang nasional untuk mengisi upaya konkret dan langsung dalam pengelolaan kerjasama kawasan guna menghindari konflik yang berkepanjangan menjadi kawasan yang damai, stabil dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam mekanisme ini, negara-negara yang terlibat dan berpartisipasi tidak membahas permasalahan klaim kawasan melainkan mencari kesepakatan bersama untuk

bekerjasama secara non-politik yang dalam perjalanannya akan memberi ruang untuk saling memahami kepentingan bersama di kawasan LCS.

Untuk menanggapi klaim sepihak China atas LCS, Indonesia perlu mengedepankan pelaksanaan atas dua prinsip kebijakan untuk pendekatan utama dalam menyikapi konflik. Pertama, memastikan keberadaan dan kehadiran secara fisik simbol negara dan penegasan penegakan hukum oleh aparat non-militer Indonesia untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, melalui proses *Confidence Building Measures* (CBMs) di antara negara-negara ASEAN yang terlibat langsung dan *Confidence Building Process* (CBP) sebagai solusi dan upaya penyelesaian masalah klaim kewilayahan dan yurisdiksi antara negara pengklaim lainnya dengan negara lain yang berkepentingan melalui pendekatan “*peaceful means through dialogue and negotiation*”. Kedua prinsip di atas merupakan hal yang bisa dan harus menjadi pegangan utama bagi Indonesia dalam turut serta melakukan pengelolaan untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Dari perspektif konstruktivisme, peran Indonesia menjaga kedaulatan di Laut China Selatan tidak bisa hanya berfokus pada soal kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas nasional, norma hukum internasional, dan interaksi sosial antar negara. Dengan menegaskan peran sebagai pemimpin ASEAN yang mengacu pada norma UNCLOS, dan membangun interaksi strategis dengan berbagai aktor, Indonesia berusaha memperkuat posisinya di tengah dinamika Laut China Selatan.

B. Strategi Indonesia Sebagai Negara Maritim Dalam Konflik Laut China Selatan

Melalui komitmen yang kuat terhadap modernisasi dan pembangunan kekuatan maritim (MEF) yang tangguh, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingannya di masa depan (Bintang, 2024). Sebagai negara yang memiliki 62% dari luas wilayahnya berupa laut dan perairan, Indonesia menyadari betapa krusialnya menjaga kedaulatan maritim serta melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Terutama dalam menghadapi dinamika konflik di Laut China Selatan seperti peningkatan kapabilitas militer regional, pergeseran geopolitik global, serta tuntutan akan perdamaian dan keadilan maritim, Indonesia perlu merumuskan strategi pertahanan yang cerdas dan adaptif. Strategi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk geopolitik regional, kekuatan militer, diplomasi internasional, serta kerjasama dengan negara-negara tetangga.

Saat ini, Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) berada dalam kondisi yang membutuhkan modernisasi signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan pertahanannya. Armada TNI-AL terdiri dari lebih dari 100 kapal, termasuk fregat, korvet, kapal selam, dan kapal patroli, namun banyak dari kapal-kapal ini sudah berusia tua dan membutuhkan pembaruan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi rencana *Minimum Essential Force* (MEF) yang bertujuan untuk memiliki 274 kapal pada tahun 2024, namun realisasi target ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan masalah pemeliharaan kapal (Gusty Da Costa, 2024).

Adapun upaya modernisasi yang dicanangkan Indonesia mencakup pembelian kapal baru seperti fregat kelas Iver Huitfeldt dari Denmark dan FREMM dari Italia, serta penambahan kapal selam kelas Nagapasa dari Korea Selatan. Namun, sebagian besar Kapal Cepat Rudal (KCR) dan kapal patroli masih memerlukan peningkatan kemampuan

tempur dan teknologi untuk menghadapi tantangan maritim saat ini, termasuk ancaman di Laut Natuna dan Laut China Selatan.

Selain itu, TNI-AL juga meningkatkan armada kapal cepat rudal (KCR) yang diproduksi di dalam negeri, seperti kelas Clurit dan Sampari, yang dilengkapi dengan rudal anti-kapal. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI-AL, tetapi juga untuk meningkatkan kehadiran militer Indonesia di wilayah strategis seperti Laut Natuna, yang merupakan bagian dari Laut China Selatan. TNI-AL juga gencar memperkuat sistem persenjataan dan sensor di kapal-kapalnya untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim. Dengan memperkuat armada lautnya, Indonesia berharap dapat lebih efektif dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya dan mencegah intrusi dari negara lain, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Pada upaya lain, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara yang terlibat sengketa Laut China Selatan melalui latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan perjanjian keamanan membantu memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim. Latihan bersama dengan Amerika Serikat dan Australia juga memberikan kesempatan untuk berbagi teknologi dan taktik militer yang mutakhir.

Namun realita dalam mengelola dinamika politik maritim di Laut China Selatan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya dalam menjaga netralitas di tengah persaingan kekuatan besar. Salah satu tantangan utama bagi Indonesia adalah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik langsung dengan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di Laut China Selatan. Oleh karena itu, Indonesia harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengelola hubungan dengan China dan Amerika Serikat. Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga prinsip bebas-aktif dalam menentukan kebijakan luar negeri. Diplomasi yang terampil dan komunikasi yang terbuka dengan semua pihak menjadi kunci untuk mencegah terjerembabnya Indonesia dalam konflik antara kekuatan besar tersebut.

Tidak hanya itu, tantangan utama Indonesia dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan pengamanan wilayah maritim adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas angkatan laut Indonesia. Untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah perairan yang luas, Indonesia membutuhkan armada kapal patroli, pesawat maritim, dan sistem pengawasan maritim yang modern. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan intelijen maritim dan berbagi informasi dengan negara-negara mitra untuk mengantisipasi ancaman seperti aktivitas ilegal, pelanggaran wilayah, dan potensi konflik di Laut China Selatan. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam bidang keamanan maritim menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani permasalahan maritim di Laut China Selatan, meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial di wilayah tersebut. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya, terutama di Laut Natuna Utara, yang kaya akan sumber daya alam dan terletak di jalur pelayaran internasional yang penting. Indonesia konsisten menegaskan klaim kedaulatan atas

wilayah tersebut, serta berkomitmen untuk menjaga kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan.

Peran Indonesia dalam diplomasi maritim sangat signifikan. Indonesia aktif mendukung penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai melalui mekanisme internasional dan forum multilateral, terutama dalam konteks ASEAN. Indonesia juga berusaha mendorong kerja sama antara negara-negara yang terlibat untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi yang berdasarkan pada hukum internasional, seperti UNCLOS. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong integrasi serta kerja sama maritim di Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat kapasitas pertahanan maritimnya untuk melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alamnya, serta menjaga keamanan jalur pelayaran internasional yang vital bagi perekonomian global. Upaya diplomatik dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara besar, serta patutnya peran aktif dalam forum-forum internasional, menjadikan Indonesia sebagai aktor penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Tenggara.

Perspektif konstruktivisme, peran Indonesia menjaga kedaulatan di Laut China Selatan tidak bisa hanya berfokus pada soal kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas nasional, norma hukum internasional, dan interaksi sosial antar negara. Dengan menegaskan peran sebagai pemimpin ASEAN, mengacu pada norma UNCLOS, dan membangun interaksi strategis dengan berbagai aktor, Indonesia berusaha memperkuat posisinya di tengah dinamika Laut China Selatan.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani isu Laut Cina Selatan sangat besar, negara ini memiliki potensi besar untuk memainkan peran lebih signifikan dalam menciptakan perdamaian, mengurangi ketegangan, dan membangun kerja sama yang lebih inklusif dan konstruktif dalam konteks geopolitik dan keamanan maritim di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Danim, S. (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

Saragih, H. M. (2018) "DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1).

Subagyo, A. dan Wirasuta, D. S. (2013) "Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia," *Jurnal Pertahanan*, 3(3), hal. 161.

Internet

Bintang, M. (2024) *Modernisasi Angkatan Laut Indonesia: Strategi Pertahanan di Tengah Konflik Laut China Selatan*, *Kompasiana*. Tersedia pada: <https://www.kompasiana.com/muhammadbintang512129/6658a12e34777c375d2a6958/modernisasi-angkatan-laut-indonesia-strategi-pertahanan-di-tengah->

